



**PROSES EKSKLUSI SOSIAL KELOMPOK PETANI
(Analisis Dampak Fenomena Urban Sprawl di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta)**

Fairuz Arta Abhipraya¹
Eko Priyo Purnomo²
Agustiyara Agustiyara³

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah istimewa
Yogyakarta, 55183, Indonesia*
*Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Indonesia*
*Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Indonesia*

Corresponding Author: fairuz.arta23@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Social Exclusion.
Keyword 2;
Farmer.
Keyword 3;
Urban Sprawl.

Abstract: This article seeks to examines the social exclusion process of farmer communities in Sleman Regency as a result of the phenomenon of urban sprawl that occurs in the Special Region of Yogyakarta due to the ease of available social access. This article uses qualitative research methods with descriptive analysis approach, and the data is obtained from library studies. The results of this study lead to the conclusion that the farmer community in Sleman Regency impated process of social exclusion due to the impact of the expansion of urban areas and land conversion from agricultural land to industrial land. The form of social exclusion created is the impact of the loss of a farmer's occupation as farmer and the failure of the farmer community to adapt to the development of the industrial sector which is replacing the agricultural sector.

Kata Kunci:

Kata kunci 1;
Eksklusi Sosial.
Kata kunci 2;
Petani.
Kata kunci 3.
Urban Sprawl.

Abstrak: Artikel ini mencoba menjelaskan mengenai proses eksklusi sosial masyarakat petani di Kabupaten Sleman akibat dari fenomena urban sprawl yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta karena kemudahan akses sosial yang tersedia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik deskriptif analisis, instrument pengumpulan data diperoleh dari studi perpustakaan. Hasil penelitian ini mendorong pada kesimpulan bahwa masyarakat petani di Kabupaten Sleman mengalami proses eksklusi sosial akibat dampak dari perluasan daerah kota dan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menuju lahan industri. Bentuk eksklusi sosial yang tercipta adalah dampak dari kehilangan mata pencaharian petani sebagai seorang petani dan kegagalan masyarakat tani dalam beradaptasi dengan perkembangan sektor industri yang menggantikan sektor pertanian.

Article History: Received: 03-Maret-2020, Revised: 05-April-2020, Accepted: 20-April-2020

PENDAHULUAN

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung aspek pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena sektor perekonomian di Indonesia masih tetap

mampu bertahan pada saat krisis ekonomi dan berdampak positif pada pemulihan sisi ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru (Febrinastri 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) (2015), menjelaskan bahwa pada 2014 tercatat sebesar 5,02% perekonomian Indonesia telah tumbuh. Menurut data BPS setidaknya ada 5 sektor di Indonesia yang memberikan pengaruh signifikan kepada perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah pertanian yang berada pada urutan terbesar ketiga dengan persentase 13,38% dan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,18%. Bahkan pada 2019 Deputy Pangan dan Pertanian Kemenko (2019), menunjukkan data bahwa sektor pertanian menempati urutan terbesar kedua dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) tepat dibawah sector industri pengolahan pada tahun 2019, 13,57 % dari total PDB. Posisinya tepat berada setelah industri pengolahan yang menyumbang sekitar 19,52% terhadap PDB. Trend ini menandakan bahwasanya sektor pertanian telah mengalami peningkatan dalam agenda penyumbangan PDB. Sektor pertanian di Indonesia juga dinilai sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja, sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, menyediakan bahan pangan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat, menyediakan bahan baku industry dan memberikan devisa bagi negara.

Yogyakarta sebagai kota yang menyandang gelar daerah istimewa mengunggulkan sektor pertanian sebagai komoditas utamanya. Sektor pertanian di Yogyakarta telah memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Badan Pusat Statistik Yogyakarta (BPS) memaparkan bahwa kontribusi yang cukup besar ini utamanya pernah berasal dari produksi tanaman pangan dan hortikultura yang mencapai 5,28% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 (Badan Pusat Statistik 2017).

Sejalan dengan pembahasan mengenai sektor pertanian, perihal lahan pertanian merupakan sebuah aspek penting bagi sektor pertanian sekaligus para petani. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang ada di wilayah DIY yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan berada di pinggiran kota Yogyakarta. Perkembangan wilayah Kabupaten Sleman terjadi cukup pesat sebagai dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan fenomena konversi lahan pertanian di kabupaten tersebut. Konversi lahan atau alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai suatu perubahan fungsi kawasan lahan dari fungsinya semula, menjadi fungsi lain yang dapat menimbulkan dampak atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan (Aprildahani, Hasyim, and Rachmawati 2014).

Isu pengalihan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Yogyakarta juga semakin berkembang. Gejala ini cenderung terjadi di desa-desa di wilayah pinggiran kota di mana lahan persawahan masih tersedia cukup luas (Bachriadi 1997). Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan bahwa alih fungsi lahan produktif di DIY dalam jangka waktu satu tahun rata-rata mencapai lebih dari 250 hektar (Pamungkas 2019). Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian di Yogyakarta disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk disuatu daerah karena Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan terdapat 106 perguruan tinggi di Yogyakarta (RISTEKDITI 2016), akibatnya banyak pendatang dari luar Yogyakarta yang datang dan menambah jumlah penduduk di Yogyakarta. Akibatnya banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi wisma, hotel, asrama, rumah kos, apartemen, perumahan, pabrik industri dan pemondokan mahasiswa.

Hal-hal tersebut menyebabkan dorongan terjadinya fenomena urban sprawl, Urban Sprawl merupakan fenomena yang sering terjadi di kota-kota besar yang tingkat kepadatan penduduknya semakin tinggi sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Bruegmann (2015), gejala urban sprawl akan timbul ke permukaan ketika sebuah kota sudah berada pada posisi kematangan ekonomi dan kesejahteraan penduduk yang memadai. Mereka yang mempunyai kemampuan memilih akan pindah ke wilayah pinggiran kota dan secara alami (karena kemampuan membayar dan preferensi sosial) akan berkumpul dan membentuk komunitas yang relatif homogen (Leisch 2002). Kemudahan akses sosial merupakan salah satu alasan besar dari penduduk desa atau luar desa yang memutuskan untuk pindah menuju kota, hal ini mengakibatkan perluasan

wilayah industri di kota hingga membuat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri di desa semakin menguat. Urban sprawl akan menimbulkan proses eksklusi sosial pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya pada masyarakat desa yang terdampak pada urban sprawl dan tidak mampu beradaptasi dengan proses pergeseran lahan pertanian menuju lahan industri yang disebabkan oleh faktor yang spesifik seperti kapabilitas, pendidikan, modal sosial dan lain sebagainya (Yunita 2018).

Dampak lanjutan dari masyarakat yang terdampak dari fenomena urban sprawl adalah praktik marjinalisasi kelompok tertentu, artinya kelompok masyarakat tani yang terdampak dari *urban sprawl* akan menjadi kelompok masyarakat yang marjinal. Masyarakat petani yang terbiasa memperoleh penghasilan dari sector pertanian harus menghadapi kenyataan sosial berupa tersedianya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapabilitas dan keterampilan mereka sebagai seorang petani yang akhirnya meminggirkan mereka, akibatnya akan berimplikasi serius terhadap taraf hidup layak masyarakat petani yang semakin tereklusi secara sosial.

Implikasi serius terhadap perekonomian akibat dari proses eksklusi social adalah terancamnya taraf kehidupan masyarakat marjinal karena tidak mampu beradaptasi dengan proses konversi lahan pertanian menuju lahan industri (Nurdin 2015). Sehingga hal ini tidak sejalan dengan konsep sustainable development goals (SDG) mengenai pemberantasan kemiskinan dan membangun inklusi social di tengah ketatnya era pembangunan serta globalisasi. Maka dari itu artikel ini akan mencoba mengidentifikasi terjadinya proses eksklusi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman yang menjadi kabupaten dengan populasi terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inklusi sosial adalah sebuah upaya untuk membuat setiap orang atau kelompok masyarakat memiliki akses atau dapat berpartisipasi untuk menikmati pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesempatan untuk bekerja, berekspreasi, dan sebagainya. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera, hal yang menjadi indicator adanya sebuah inklusifitas sosial adalah pekerja dan pekerjaan yang layak, sumber daya pendapatan dan ekonomi yang memadai, sumber daya material, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, perumahan, sumberdaya sosial, sumber daya komunitas, dan keselamatan pribadi (Labonté, Hadi, and Kauffmann 2011). Namun dengan pesatnya laju globalisasi yang diikuti oleh pembangunan di titik tertentu seperti wilayah perkotaan, maka akan mendorong terbukanya akses sosial sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk berebut meraih akses sosial di wilayah perkotaan yang disebut dengan fenomena urbanisasi.

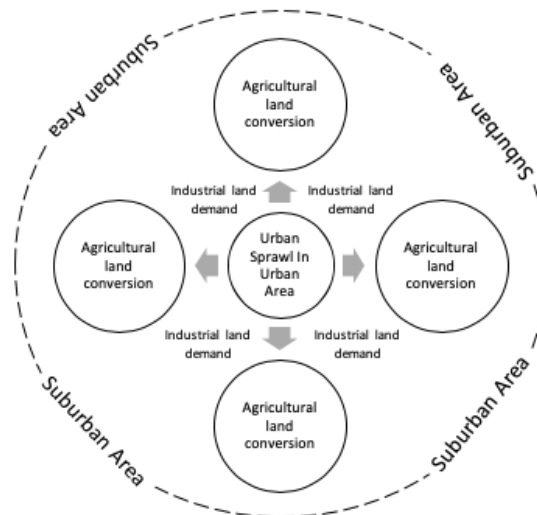
Dengan adanya fenomena urbanisasi maka permintaan kebutuhan lahan didaerah perkotaan akan semakin meningkat sehingga meluas ke daerah pinggiran dan mendorong terjadinya fenomena urban sprawl. Menurut Yeates dan Garner (1980), urban sprawl tidak hanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan ruang, urban sprawl juga disebabkan karena adanya perubahan kemampuan sistem transportasi, pembangunan perumahan, akses sosial dan keberadaan infrastruktur. Sehingga tidak salah apabila urban sprawl didefinisikan sebagai proses pertumbuhan daerah pinggiran secara leapfrog dari inti kota, dimana dengan pertumbuhan kota yang tidak sesuai menyebabkan sarana dan prasarana kota menjadi tidak efisien.

Hal ini mendorong bentuk moderenisasi di wilayah pinggiran seperti wilayah perdesaan untuk mengubah sumber perekonomiannya di sektor industri, sehingga secara otomatis terjadi sebuah alihfungsi lahan di wilayah perdesaan menjadi lahan industri. Perihal alih fungsi lahan yang merupakan sebuah dampak dari fenomena urban sprawl adalah sebuah konsep perebutan lahan di wilayah perkotaan, meminjam analisis dari Marx dalam Basundoro (Basundoro 2012) perebutan dalam konsep ini merupakan bagian dari perebutan alat-alat produksi. Hal ini sangat diwajibkan ketika kondisi pertambahan penduduk yang diimbangi dengan pertambahan Kawasan hunian dan kegiatan pembangunan yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyelaraskan dengan prinsip ekonomi yang mengatakan bahwasanya pemilik lahan akan berorientasi kepada pilihan rasional yang bergantung pada kegiatan yang lebih produktif untuk memenuhi pasar dan kegiatan yang dianggap kurang/tidak produktif akan ditinggalkan untuk mencari kegiatan yang lebih produktif.

Dampak dari modernisasi pedesaan ternyata memberikan implikasi serius terhadap kesetaraan ekonomi di wilayah pedesaan tersebut, menurut Dharmawan (2007) juga mengungkapkan bahwa modernisasi pedesaan telah membawa ketimpangan (*inequality*) akses terhadap sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. Terbatasnya atau timpangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber nafkah akibat kurangnya kesiapan masyarakat desa untuk menghadapi modernisasi membuat hanya mereka yang memiliki modal ekonomi atau kekuasaan yang dapat mengakses lahan yang tersisa.

Dengan terjadinya ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya di wilayah pedesaan, maka masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan akan mengalami pengucilan dari masyarakat yang memiliki akses sosial lebih, hal ini disebut sebagai fenomena eksklusi sosial. Menurut Giddens (1988) eksklusi sosial secara jelas menggambarkan cara-cara individu untuk terputus dari keterlibatan sosial secara penuh pada scope masyarakat yang lebih luas. Sedangkan menurut Marx (dalam Swingewood and Giddens 1988) menyebutkan bahwa eksklusi sosial memiliki hubungan integral dengan *underclass*, *underclass* yang dimaksud oleh Marx adalah sebagai *lumpenproletariat* yang berarti kelompok masyarakat yang berada diluar bentuk dominan produksi dan pertukaran ekonomi, kesimpulan yang Marx coba sampaikan adalah eksklusi sosial merupakan dampak dari kemiskinan masyarakat *underclass* yang tidak lagi mampu menjadi dominan ditengah kelompok masyarakat untuk mengakses berbagai kesempatan publik.

Gambar.1 Proses Alihfungsi Lahan Akibat Dampak Dari Fenomena Urban Sprawl



Berdasarkan studi dari Rohman (2019) yang melihat eksklusi sosial berdasarkan sudut pandang disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas tuna netra, studi ini menemukan bahwa penyandang tuna netra akan terdampak eksklusi social dalam lingkaran lingkungan kerjanya. Sedangkan studi dari Fathy (2019) memperlihatkan konsep eksklusi sosial dari sudut pandang yang lebih luas dibandingkan dengan studi sebelumnya. Modal sosial menjadi indikator penting bagi terciptanya sebuah inklusifitas ditengah komunitas masyarakat, artinya bahwa semakin tinggi modal social maka akan semakin inklusif masyarakat tersebut, namun jika modal sosialnya rendah maka akan semakin eksklusif masyarakat tersebut. Sedangkan studi dari Redmond (2014) mendukung hasil studi dari penelitian Fathy. Namun Redmond melihat dari sudut pandang bagaimana anak-anak terdampak eksklusi social akibat dari kemiskinan keluarga ditengah lingkungan masyarakat kalangan menengah keatas, bentuk eksklusi sosialnya berupa pengucilan anak-anak dari hak asasi yang relevan dengan anak-anak.

Selain dalam lingkup ekonomi, studi dari Divan (2016) memaparkan bahwa eksklusi social juga tidak hanya terjadi di kalangan menengah kebawah (*underclass*) karena keterbatasan sumberdaya finansial jika dibandingkan dengan komunitas masyarakat sekitar, namun juga

dapat terjadi didalam lingkup sebuah identitas seperti transgender. Namun sejalan dengan itu, studi dari Martinez (Oxman-Martinez et al. 2012) yang mengemukakan bahwasanya sikap rasisme terhadap peredaan identitas mayoritas masih sering terjadi khususnya di institusi Pendidikan tingkat sekolah dasar, hal ini berimplikasi khusus terhadap proses eksklusi sosial anak-anak kaum minoritas dalam bermain dengan teman sebayanya. Menurut studi dari Dzuriatun (2011), konsep eklusi sosial yang ditawarkan bukan hanya terjadi di lingkaran identitas, ekonomi dan sejenisnya. Studinya menemukan bahwa akses sosial seperti mengetahui dana pemerintah lokal juga turut mengambil peran penting dalam proses inklusi sosial masyarakat, hal ini terjadi karena absenya peran public dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut pendanaan pemerintah lokal.

Menurut tinjauan pustaka di atas, tidak ada studi khusus yang membahas tentang bagaimana urban sprawl memberikan dampak pada proses pengucilan sosial komunitas petani di wilayah khusus Yogyakarta sebagai “kota pelajar”, artinya orang yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya untuk bekerja tetapi juga untuk menuntut ilmu diperguruan tinggi dan jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki penduduk paling banyak jika dibandingkan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan rill (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena, yakni apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya (Chariri 2009). Sedangkan teknik deskriptif analitis dapat diartikan sebagai prosedur penyelesaian masalah yang diselidiki dengan menampilkan gambar keadaan subjek atau objek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat ini berdasarkan fakta yang tertulis, terlihat dan sebagainya (Nawawi 2015).

Teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dengan mencari sumber tertulis. Sumber utama adalah buku literatur, makalah ilmiah, jurnal ilmiah nasional/internasional, dokumen dan laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian(Nazir 2004). Anilis data penelitian juga dilakukan melalui proses studi dan analisis mendalam tentang temuan sumber dan dokumen jurnal atau laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis kemudian menganalisis fenomena kasus secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Georafis Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang mendapatkan gelar daerah istimewa berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur perihal keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Luas dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km², yang terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/kelurahan dengan jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2019 sebanyak 3.842.932 Jiwa (Badan Pusat Statistik DIY n.d.). Dari jumlah empat kabupaten yang terdiri dari kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di Saerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti hanya berfokus dengan satu kabupaten yang menjadi objek penelitian yaitu Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman terletak di sebelah utara perbatasan Kabupaten Boyolali yang terletak di provinsi Jawa Tengah, disebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Gambar.2 Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

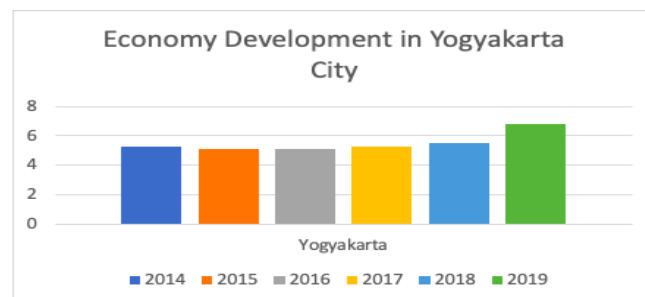


Sumber: Website Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb DIY

Potensi Wilayah

Kota Yogyakarta pada perkembangannya selalu mengalami pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, data tersebut bisa dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik DIY(2019) yang membuktikan mengenai pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta.

Gambar.3 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta



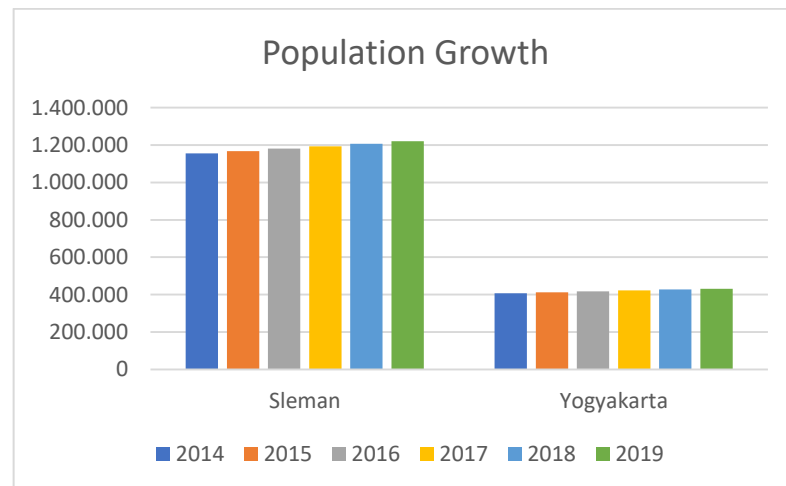
Sumber: Website Badan Pusat Statistik DIY

Data dalam chart diatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta 5 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2019. Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 yang sempat mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini mendorong masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran dan daerah

luar Yogyakarta untuk merantau ke daerah kota karena akses sosial yang mudah untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi, fenomena ini disebut dengan fenomena urban sprawl. Disisi lain Kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan turut mengundang banyak pendatang untuk belajar di kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman juga mengalami pertumbuhan penduduk secara konsisten dari rentan waktu 5 tahun terakhir pada tahun 2014 hingga 2019 (BADAN PUSAT STATISTIK 2020).

Gambar. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk di kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta



Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik

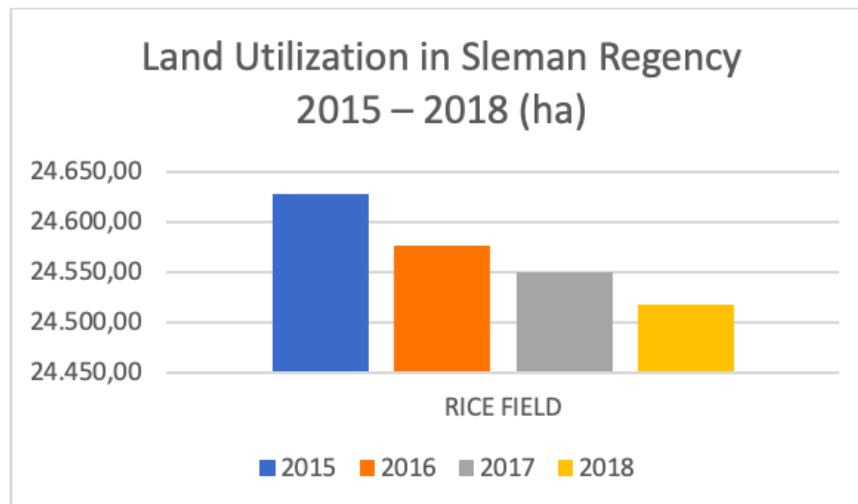
Data diatas menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di kota Yogyakarta dan kabupaten sleman. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disebabkan akses sosial serta pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta maka akan menimbulkan fenomena yang dinamakan urban sprawl atau perluasan daerah perkotaan menuju daerah pinggiran karena padatnya jumlah penduduk dan tidak adanya ruang terbuka lagi didaerah perkotaan. Data ini sejalan dengan dengan teori yang dikemukakan oleh Bruegmann (2015) yang memaparkan bahwa fenomena Urban Sprawl akan terjadi ketika kematangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah sudah tinggi. Peningkatan ekonomi dan kemudahan akses sosial di kota Yogyakarta mampu membuat masyarakat yang tinggal didaerah pinggiran seperti kabupaten sleman dan masyarakat dari luar kota berpindah ke kota Yogyakarta untuk meraih akses sosial, sehingga ketersediaan ruang untuk ditinggali semakin kecil dan mendorong fenomena urban sprawl untuk memperluas ruang terbuka.

Dengan hadirnya fenomena Urban Sprawl yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di daerah perkotaan kota Yogyakarta maka daerah pinggiran di kabupaten sleman yang didominasi dengan lahan pertanian akan mengalami proses alihfungsi lahan dari lahan pertanian menuju lahan non-pertanian yang disebabkan oleh ekspansi lahan perkotaan menuju lahan pinggiran, karena sejatinya proses ekspansi lahan pertanian merupakan bentuk fisik dari proses urbanisasi, dampak lanjutanya adalah akan berimplikasi terhadap hilangnya pekerjaan petani dan ketimpangan ekonomi di daerah tersebut akibat dari urban sprawl yang tidak terkontrol. Fakta ini didukung oleh data yang dikeluarkan oleh BPS (Qomah 2016) , yang memaparkan bahwa ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di Kabupaten Sleman masih terbilang cukup tinggi yang diakibatkan oleh arus urbanisasi perpindahan masyarakat desa menuju kota, namun mereka tidak bisa beradaptasi di kota dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebaliknya banyak orang kaya yang tinggal di Kabupaten Sleman di daerah kondominium. Menurut Lockeretz (1989) bentuk ekspansi lahan perkotaan akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap wilayah perdesaan, yaitu bentuk

alihfungsi lahan pertanian dan meningkatnya penduduk yang bekerja di bidang non-pertanian karena berkurangnya lahan pertanian.

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman (2019), Kabupaten Sleman mengalami penurunan luas lahan pertanian dalam satuan hektar.

Gambar.5 Penggunaan Lahan Pertanian Dalam Rentan 2015-2018

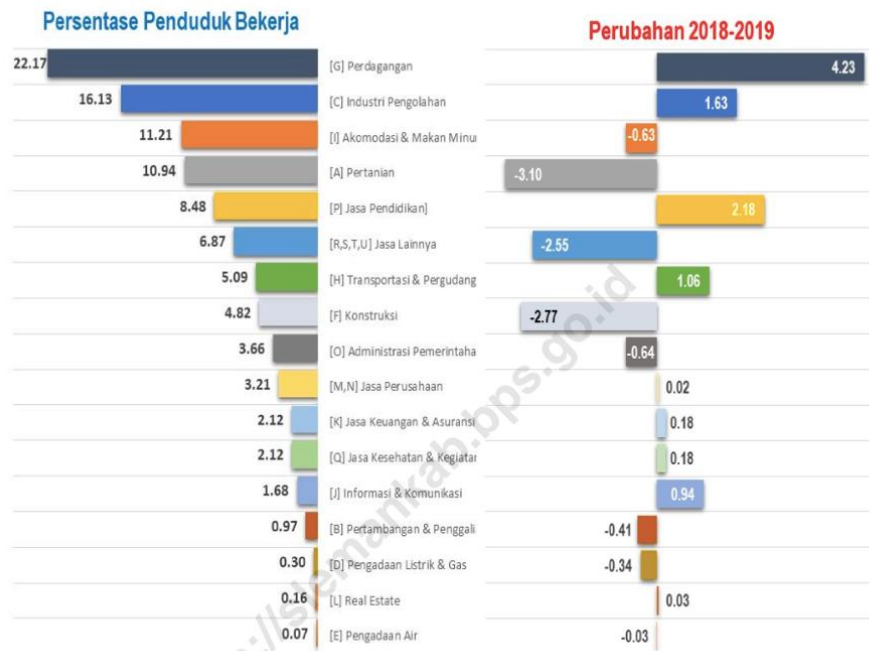


Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

Data diatas menampilkan bahwa terjadi fenomena penurunan luas wilayah pertanian secara konsisten setiap tahunnya dari tahun 2015-2018 dalam satuan hektare (ha), khususnya tanah yang digunakan untuk bertani yaitu sawah (*rice field*). Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pertanian DIY (2019), penyebab menurunnya luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sleman disebabkan oleh pembangunan perumahan, ruko, pabrik dan fasilitas lainnya diluar sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan diluar kegiatan pertanian yaitu sektor industri. Penyebab terjadinya hal ini adalah karena pertambahan penduduk di Yogyakarta yang meluas hingga ke Kabupaten Sleman lebih membutuhkan komoditas industri dibandingkan komoditas pertanian untuk menunjang aktifitas keseharian mereka, sehingga dengan bertambahnya pendudukan dengan kebutuhannya disektor non-pertanian akan berbanding lurus dengan tingkat pembangunan di Kabupaten Sleman. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fajriyana (2017) yang menjelaskan bahwa bertambahnya penduduk yang diiringi dengan proses pembangunan disektor non-petanian sehingga mendorong alihfungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan di sektor non-pertanian.

Dengan hadirnya fenomena alihfungsi lahan pertanian menuju lahan non-pertanian seperti industri, maka hal ini akan mendorong konversi profesi para petani di Kabupaten Sleman. Alihfungsi lahan pertanian akan berbanding lurus dengan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian dan turut mendorong munculnya tenaga kerja di sektor industri, hal ini dibuktikan oleh laporan Badan Pusat Statistik (2019) mengenai kondisi angkatan kerja kabupaten sleman dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 dalam satuan persen.

Gambar.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Sleman, Agustus 2019 dan Perubahannya (2018-2019)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

Gambar diatas telah menunjukkan data dalam satuan persen bahwa pada rentang tahun 2018 hingga 2019 tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor industri telah mengalami perubahan jumlah. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang berkecimpung di sektor pertanian mencapai 10.94 persen yang telah mengalami penurunan semenjak satu tahun terakhir pada tahun 2018 sebesar 3.20 persen, dan sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja paling besar di Kabupaten Sleman. Sektor industri pada tahun 2019 memiliki tenaga kerja mencapai 16.12 persen yang telah mengalami kenaikan pada rentan waktu satu tahun terakhir pada tahun 2018 sebesar 1.63 persen. Hal ini membuktikan bahwasanya menurunnya luas lahan pertanian akibat dari alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan industri akan secara otomatis berbanding lurus dengan bentuk konversi profesi, jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian akan menurun dan angkatan kerja pada sektor industri akan meningkat (Lockeretz 1989).

Eksklusi Sosial Kelompok Petani

Berkurangnya lahan pertanian karena telah dialihfungsikan menjadi lahan industri secara otomatis mendorong wilayah kabupaten sleman untuk semakin terbuka kepada penduduk pendatang, dimana penduduk pendatang memiliki karakter yang berbeda dari masyarakat kabupaten sleman. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti profesi, tingkat pendidikan, dan tingkat kesejahteraan.

Selanjutnya dengan berubahnya lahan pertanian di kabupaten sleman menjadi lahan industri, akan berimplikasi khusus terhadap harga tanah yang semakin tinggi sehingga banyak pemilik tanah yang menjual lahan pertanian tersebut, namun di beberapa kasus daerah pinggiran seperti di perdesaan juga memiliki harga tanah yang murah sehingga ini mendorong masyarakat dari luar tegoda untuk membeli tanah di desa untuk nantinya diubah menjadi usaha yang bersifat non-pertanian sebagai lahan investasi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwasanya rasio harga tanah dan rasio aksesibilitas suatu daerah akan mempengaruhi proses alihfungsi lahan (Kurniasari, Kurniasari, and Ariastita 2014), fakta ini didukung oleh letak geografis Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga kabupaten sleman memiliki aksesibilitas yang tinggi untuk mobilitas masyarakat. Sehingga berimplikasi serius terhadap kehidupan kelompok petani yang kehilangan profesinya sebagai

petani (pengangguran) atau beralih profesi menjadi buruh yang bergantung kepada pemilik sektor semakin memperburuk keadaan ekonomi para petani karena ketidakpastian pendapatan.

Para petani yang tidak memiliki hak atas tanah dan hanya bergantung pada pekerjaan menggarap tanah milik tuanya akan kesulitan mencari pekerjaan baru setelah pemilik tanah memilih untuk menjual tanahnya atau mengubah tanahnya ke sektor yang bersifat non-pertanian. Disamping kapabilitas dan keterampilan yang kurang di luar sektor pertanian, faktor rendahnya pendidikan para petani juga menjadi sebuah hambatan untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang layak untuk menaikan taraf hidup mereka di sektor industri. Tuntutan pekerjaan dalam sektor industri yang mengharuskan calon pekerja memiliki kriteria minimum pendidikan justru memberatkan para petani, karena para petani tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi untuk bekerja di sektor industri.

Jika hal ini terjadi maka akan berimplikasi kepada taraf kehidupan para petani yang disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Dewi (Dewi and Rudiarto 2013), bahwa mayoritas petani yang lahan pertaniannya sudah terdampak alihfungsi lahan menuju lahan non-pertanian akan mengalami penurunan pendapatan dikarenakan faktor pendidikan, faktor keterampilan, modal sosial dan lain sebagainya untuk mengakses pekerjaan formal.

Dengan menurunnya lahan pertanian, maka fakta ini akan berbanding lurus dengan berturunnya jumlah masyarakat yang bekerja disektor pertanian seperti petani. Hal ini akan menimbulkan fenomena konversi profesi kepada kelompok petani Kabupaten Sleman yang dahulu bekerja sebagai kelompok yang menggarap lahan pertanian menjadi kelompok yang bekerja di sektor industri. Dengan kehadiran sektor industri di Kabupaten Sleman seharusnya mampu menyerap tenaga kerja untuk masyarakat Kabupaten Sleman khususnya kelompok petani yang kehilangan lahanya akibat proses alihfungsi lahan pertanian.

Namun faktanya seperti yang ditunjukkan pada gambar.6 yang menunjukkan data bahwa pada rentan waktu 2018 hingga 2019 sektor industri hanya menyerap tenaga kerja sebesar 1.63 persen, sedangkan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian pada rentan tahun 2018 hingga 2019 sebesar 3.20 persen. Artinya bahwa ada sebagian besar kelompok petani yang kehilangan pekerjaan sebagai petani akibat alihfungsi lahan pertanian menuju lahan industry, namun mereka tidak tertampung untuk bekerja di sektor industri.

Jika kelompok petani dengan kapabilitas dan jenjang pendidikan yang tidak begitu tinggi memaksakan diri untuk bekerja di sektor industri, maka posisi yang akan mereka dapatkan bukan posisi yang bisa meningkatkan taraf kehidupannya melainkan hanya sebatas menjadi buruh di sektor industry atau bahkan menjadi pengangguran akibat syarat untuk bekerja di sektor industri terlalu tinggi.

Hal ini akan berdampak pada tingkat kemiskinan para petani dan tingkat ketergantungan para petani terhadap penghasilan yang rendah sebagai buruh di Kabupaten Sleman. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP (2019), melaporkan data bahwasanya rasio ketimpangan (indeks gini rasio) di kabupaten sleman cukup tinggi mencapai 0,41 yang artinya bahwa masih ada ketimpangan lebar antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Selain itu LKIP juga turut melaporkan bahwasanya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman masih terbilang cukup tinggi mencapai 31.355 kepala keluarga (KK) atau mencapai 8,77% dari total penduduk. Nilai tukar petani (NTP) di Kabupaten Sleman juga masih sangat rendah, yaitu mencapai 119,02.

Dengan rendahnya penghasilan para petani akibat dampak dari alihfungsi lahan pertanian menuju lahan non-pertanian yang berimplikasi secara langsung terhadap tingkat kemiskinan para petani, maka mereka akan kesulitan dalam memperoleh akses sosial karena kemiskinan yang terjadi kepada mereka seperti layanan pendidikan, layanan energi, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Disisi lain hadirnya pendatang ke Kabupaten Sleman yang secara tingkat kesejahteraanya berbeda akan mendatangkan anggapan mengenai kelas sosial yang berbeda, fenomena seperti ini justru akan memperkuat proses eklusi sosial kelompok petani dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sleman.

Selain itu, tidak mampunya para petani mengakses layanan pendidikan untuk keluarganya hingga jenjang perguruan tinggi karena faktor kemiskinan akan semakin membuat mereka terpinggirkan, sebab Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota pelajar yang dikenal memiliki banyak perguruan tinggi dan banyak kelompok orang yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masuk ke perguruan tinggi sehingga hal tersebut bisa menciptakan ketimpangan antara masyarakat asli kabupaten sleman dengan para pendatang pada aspek tingkat pendidikan. Dharmawan (2007) juga mengungkapkan bahwa modernisasi pedesaan telah membawa ketimpangan (inequality) akses terhadap sumber-sumber nafkah bagi masyarakat. Terbatasnya atau timpangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber nafkah membuat hanya mereka yang memiliki modal ekonomi atau kekuasaan yang dapat mengakses lahan yang tersisa.

KESIMPULAN

Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki problematika terkait taraf kehidupan kelompok petani. Fenomena Urban Sprawl yang terjadi di Kota Yogyakarta akibat kemudahan akses sosial yang ada memiliki implikasi secara langsung terhadap proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri karena kebutuhan lahan terbuka yang melebar hingga Kabupaten Sleman, sehingga hal ini membuat kelompok petani kehilangan pekerjaannya sebagai seorang petani akibat dari kehilangan lahan pertanian tersebut.

Hal ini berdampak pada tingkat pendapatan kelompok petani yang rendah akibat harus bekerja di sektor industri dengan keterampilan dan jenjang pendidikan yang rendah, bahkan tidak semua kelompok petani dapat bekerja di sektor industri karena tingginya persyaratan untuk bekerja di sektor industri. Sehingga tingkat kemiskinan kelompok petani akan semakin tinggi serta menimbulkan dampak eksklusi sosial terhadap masyarakat pendatang dan masyarakat sekitar yang memiliki taraf hidup yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprildahani, Abdul Wahid Hasyim, and Turniningtyas Ayu Rachmawati. 2014. 'Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Perkotaan Karangplsono , Kabupaten Malang Sebagai Dampak Dari Urban Sprawl'. *PAL*.
- Bachriadi, Dianto. 1997. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *Reformasi Agraria: Politik, Sengketa, Dan Agenda Pembaharuan Agraria Di Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta *Statistik Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*.
- BADAN PUSAT STATISTIK. 2020. *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik DIY. 2019. *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan III-2019*. Yogyakarta.
- . *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta (Jiwa), 2010-2019*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2019. *Laporan Eksekutif: Laporan Angkatan Kerja Kabupaten Sleman 2017-2019*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Sleman Regency. *Land Utilization in Sleman Regency 2015 – 2018 (Ha)*. Yogyakarta.
- Bappeda Provinsi Yogyakarta. 2020. *Laju Pertumbuhan Penduduk Data Vertikal Badan Pusat Statistik DIY*. Yogyakarta.
- Basundoro, Purnawan. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Brueggemann, Robert. 2015. 'Urban Sprawl'. In *International Encyclopedia of the Social &*

Behavioral Sciences: Second Edition.

- Chariri, Anis. 2009. 'Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif'. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.*
- Dewi, Nurma Kumala, and Iwan Rudiarto. 2013. 'Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang'. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan.*
- Dharmawan, Arya Hadi. 2007. 'Sistem Penghidupan Dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat Dan Mazhab Bogor'. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.*
- Divan, Vivek, Clifton Cortez, Marina Smelyanskaya, and Joanne Keatley. 2016. 'Transgender Social Inclusion and Equality: A Pivotal Path to Development'. *Journal of the International AIDS Society.*
- Fajriany, Nur Isra. 2017. 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Pangkep'. *Jurnal Universitas Alauddin Makassar.*
- Fathy, Rusydan. 2019. 'Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat'. *Jurnal Pemikiran Sosiologi.*
- Febrinastris, Fabiola. 2020. 'Sektor Pertanian Mampu Bertahan Dalam Perlambatan Ekonomi Indonesia'. *suara.com.*
- Kurniasari, Merisa, Merisa Kurniasari, and Putu Gde Ariastita. 2014. 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian Di Kabupaten Lamongan'. *Jurnal Teknik ITS.*
- Labonté, Ronald, Abdullahel Hadi, and Xaxier E Kauffmann. 2011. 'Indicators of Social Exclusion and Inclusion: A Critical and Comparative Analysis of the Literature'. *É/Exchange Working Papers.*
- Leisch, Harald. 2002. 'Gated Communities in Indonesia'. *Cities.*
- Lockeretz, William. 1989. 'Secondary Effects on Midwestern Agriculture of Metropolitan Development and Decreases in Farmland'. *Land Economics.*
- Nawawi, Hadar. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir. 2004. 'Metode Penelitian'. *Metode penelitian.*
- Nurdin, Fadhil. 2015. 'Eksklusi Sosial Dan Pembangunan: Makna, Fokus Dan Dimensi Untuk Kajian Sosiologis'. In *Makalah Disajikan Pada Kegiatan Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia Dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV Manado, 20-23 Mei 2015.*
- Oxman-Martinez, Jacqueline et al. 2012. 'Perceived Ethnic Discrimination and Social Exclusion: Newcomer Immigrant Children in Canada'. *American Journal of Orthopsychiatry.*
- Pamungkas, Suluh. 2019. 'Alih Fungsi Lahan Produktif Di DIY Setahun Mencapai 250 Hektar Lebih'. *Tribunjogja.com.*
- 'Pemerintah Ingin Pertanian Berkontribusi Besar Ke Ekonomi'. 2019. *cnnindonesia.com.*
- Qomah, Kusnul Isti. 2016. 'KETIMPANGAN EKONOMI Di Sleman Tinggi Karena Urbanisasi'. *Solopos.com.*
- Ratih, Dewi. 2019. 'Forum Rembug Warga Bersama Untuk Perubahan Sleman'. *Bernas.id.*
- Redmond, Gerry. 2014. 'Poverty and Social Exclusion'. In *Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective.*
- RISTEKDITI. 2016. *Jumlah Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah V – Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- Rohman, Yani Fathur. 2019. 'Eksklusi Sosial Dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan Terhadap Akses Pekerjaan'. *Indonesian Journal of Religion and Society, www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS* Vol. 01 (0: 51–66.
- Setiawan, Silvy Dian. 2019. 'Alih Fungsi Lahan Di DIY Capai 250 Hektare per Tahun'.
- Swingewood, Alan, and Anthony Giddens. 1988. 'Social Theory and Modern Sociology'. *The British Journal of Sociology.*
- Toyibah, Dzuriyatun. 2011. 'Eksklusi Sosial Dalam Anggaran Publik Studi Kasus Di Ngawi, Lamongan, Dan Makasar'. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi.*
- Wicaksono, Pebrianto Eko. 2015. 'Ini 5 Sektor Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekonomi RI'. *Liputan6.com.*

- Yunita, S.Sos., M.Si, Desi. 2018. 'Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Petani'. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*.
- Yunita, S.Sos., M.Si, Desi. 2018. 'Eksklusi Sosial Pada Masyarakat Petani'. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjn_tSCocLoAhUbeySKHZNYCR4QFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fjurnal.unpad.ac.id%2Fsosioglobal%2Farticle%2Fdownload%2F17084%2Fpdf&usg=AOvVaw1Xn8ljpIMA87TI10662yJt